

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa yang merupakan calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting didiskusikan. Tak hanya itu, negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan anak. Seiring berkembangnya teknologi informasi yang sulit dibendung, ditambah iklim demokrasi yang menjamin kebebasan pers, maka berbagai macam isu sangatlah mudah sampai kepada publik, untuk kemudian ramai ramai dibahas dan diperbincangkan. Itupun tak terkecuali isu mengenai anak yang berhadapan dengan hukum¹.

Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa.

Maka dari itu penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak. Hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat pada Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 20. Adapun Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua, wali dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, teman dan masih banyak lagi apabila ingin diuraikan lebih lanjut.

¹M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1-2.

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas, walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.

Konstitusi Indonesia Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dengan dicantumkan hak anak tersebut dalam batang konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari².

Adapun peran paling penting bagi pembentukan karakter anak adalah orang terdekatnya yaitu Orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.

Beberapa cara yang dilakukan oleh orang tua dalam pendekatan terhadap anak yaitu fungsi sosialisasi terhadap anak, melalui fungsi ini, keluarga berusaha mempersiapkan bekal selengkapnyanya kepada anak dengan memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat serta mempelajari peranan yang diharapkan akan dijalankan oleh mereka³.

Walaupun orang tua sudah berperan dengan baik dalam mendidik anak, pergaulan di luar yang tidak diketahuai orang tua kadang memberikan dampak yang buruk bagi perkembangannya, bebasnya kehidupan dan pergaulan di DIY dapat

²*Ibid.* hlm. 11-12.

³<http://dodypp.blogspot.com/2010/09/peran-dan-fungsi-orang-tua-dalam.html/> diakses pada tanggal 9 september 2015 jam 09.20 wib.

mempengaruhi perilaku anak misalnya mulai ikut kelompok yang tidak baik dan mengenal dunia malam seperti diskotik yang identik dengan beberapa perilaku negatif mulai dari mabuk karena minuman keras, memakai obat-obatan terlarang dan sampai dengan perilaku yang menyimpang seperti seks bebas.

Perilaku seks bebas dapat memicu tindakan aborsi karena adanya kehamilan yang tidak diinginkan(KTD). Bahkan ada orang tua yang memerintahkan untuk menggugurkan kandungan anak gadisnya karena rasa malu agar terhindari gosip di keluarga maupun di lingkungan sekitar. Aborsi dianggap sebagai solusi atau jalan terbaik dari masalah yang ditimbulkan sebagai akibat dari perilaku seks bebas.

Manusia sejak berada dalam kandungan memiliki hak hidup yang melekat erat sebagai fitrahnya. Hak ini tidak dapat dicabut oleh siapapun dan dengan alasan apapun kecuali oleh Sang Pemberi Kehidupan yaitu Tuhan. Oleh karena itu aturan pertama yang melandasi kehidupan manusia adalah menghormati hidup itu sendiri. Didalam banyak cerita dan mitologi, merampas hidup orang lain adalah dosa yang sangat berat. Begitupun didalam semua agama, bagaimana anak Adam harus menghadapi murka Tuhan terhadap pembunuhan yang dilakukannya dan menyandangnya sebagai dosa awal yang terus menyertai manusia sepanjang hidupnya adalah sebuah bukti bahwa menghilangkan hidup seseorang adalah perbuatan yang jahat⁴.

Pengertian aborsi yaitu menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran sering dikenal dengan istilah “Abortus” berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh⁵.

⁴Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Cetakan 1, Pustaka book publisher, Sleman Yogyakarta, hlm 59.

⁵<http://www.obataborsi.name/definisi-aborsi/> diakses pada tanggal 9 september 2015 11.23 wib.

Maka dari itu aborsi merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan baik dari segi agama maupun hukum yang berlaku karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, yang merupakan negara hukum yang melarang keras tindakan aborsi.

Hal ini ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349. Dengan demikian alasan apapun, aborsi adalah tindakan melanggar hukum⁶. Akan tetapi aborsi dapat dibenarkan apabila ada alasan medis dan alasan pribadi seperti akibat perkosaan yang diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Salah satu penegak hukum di Indonesia yang sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat adalah polisi yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penegak hukum adalah badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara⁷.

Didalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 pada Pasal 1 ayat (1) Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Adapun fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

⁶<https://melakatrini.wordpress.com/2014/11/10/peraturan-pemerintah-undang-undang-republik-indonesia-tentang-aborsi-bayi-tabung-dan-adopsi/> diakses pada tanggal 10 september 2015 jam 11.37 wib.

⁷<https://sasmitasmanisa.wordpress.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum/> diakses pada tanggal 10 september 2015 13.02 wib.

masyarakat yang terdapat pada Pasal 2 Undang–Undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia⁸.

Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berkaitan dengan Tugas dan Wewenang Kepolisian yang terdapat dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka penulis secara khusus ingin meninjau tugas dan wewenang dari kepolisian dengan melakukan penulisan hukum yang mengambil Judul :

“PERAN POLISI DIY DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Polisi DIY dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur ?
2. Kendala apa yang dihadapi Polisi DIY dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur?

⁸http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2002_2.pdf/diakses pada tanggal 10 september 2015 13.50 wib.

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang peran Polisi DIY dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang di alami Polisi DIY dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan anak di bawah umur.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana, juga untuk memberikan pengetahuan hukum bagi penulis dan pembaca.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Memperluas pengetahuan Mahasiswa mengenai hukum pidana khususnya berkaitan dengan penanggulangan terhadap Aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang ditangani oleh Polda DIY.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum, dan juga dapat digunakan sebagai bahan refrensi dan informasi bagi Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan karya asli penulis dengan judul “Peran Polisis DIY dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi yang dilakukan Oleh Anak dibawah umur” dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penulis

atau peneliti lain. Sebagai perbandingan dikemukakan tiga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini sebagai berikut :

1. Abortus Provokatus Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia yang ditulis oleh Paulus Benny Halim, nomor mahasiswa 060509514, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

a. Rumusan masalah :

Apakah abortus provokatus bertentangan dengan Hak Asasi Manusia?

b. Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui apakah abortus provokatus dibenarkan dalam Hak Asasi Manusia?

c. Hasil Penelitian :

Ditinjau dari peraturan mengenai Hak Asasi Manusia Di Indonesia dalam hal ini menurut Undang – Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, abortus Provokatus tidak dibenarkan karena manusia memiliki hak untuk hidup yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) UU RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan hak untuk hidup dipandang sebagai salah satu hak asasi manusia yang paling kodrati, karena itu abortus provokatus bukan merupakan dari hak asasi manusia, tetapi justru melanggar hak asasi manusia yang paling kodrati. Namun disisi lain Abortus Provokatus tidak melanggar HAM jika itu menyangkut kehidupan sang ibu hamil dan anak dalam kandungan sang Ibu yang harus dilakukan untuk dilakukannya Abortus Provokatus berdasarkan indikasi medis demi menyelamatkan nyawa dari sang ibu hamil dan anak dalam kandungannya dalam hal ini Abortus Provokatus tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

2. Ijin Suami Terhadap Istri Yang Melakukan Aborsi Akibat Perkosaan yang ditulis oleh Betsy Marbun, nomor mahasiswa 060509438, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

a. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimanakah peran suami terkait aborsi yang terbukti dilakukan oleh istri akibat perkosaan?
- 2) Bagaimanakah jika aborsi itu dilakukan terhadap kehamilan yang di hasilkan oleh pembuahan dengan suaminya sendiri?

b. Tujuan penelitian :

- 1) Untuk mengetahui peran suami terkait aborsi yang dilakukan oleh istri akibat perkosaan.
- 2) Untuk mengetahui apakah aborsi itu dilakukan terhadap kehamilan yang dihasilkan oleh pembuahan dengan suaminya sendiri.

c. Hasil Penelitian

- 1) Peran suami terkait aborsi yang dilakukan oleh isteri akibat perkosaan yaitu berupa:
 - a) Pada dasarnya suami isteri punya peranan yang sama pentingnya dalam perkawinan, namun pada dasarnya suami memegang peran yang lebih kuat dalam memberi keputusan, karena suami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab atas istri dan anak – anaknya. Khususnya dalam hal ini sang istri yang melakukan aborsi di karenakan akibat perkosaan.
 - b) Suami isteri sudah terkait menjadi satu dalam ikatan perkawinan, jadi keputusan dalam perkawinan harus didasarkan atas putusan bersama antara suami isteri.

Suami punya kewajiban untuk mengatur dan membimbing istrinya yang masih terikat dalam hubungan perkawinan.

- 2) Bila ternyata aborsi yang dilakukan terhadap kehamilan yang dihasilkan oleh pembuahan suaminya sendiri, maka izin suami wajib di perlukan dari awal masa kehamilannya tanpa memperhitungkan apakah janin tersebut hasil perkosaan atau bukan. Selain itu adanya resiko yang harus dihadapi istri yang akan melakukan operasi [enghentian kehamilan, juga merupakan tanggung jawab suami untuk melindungi nyawa isterinya. Pentingnya pengarahan suami untuk mendampingi isterinya yang akan melakukan penghentian kehamilan, apalagi hal ini menyangkut nyawa seseorang.

3. Pertanggung jawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Aborsi Diwilayah Hukum Pengadilan Sleman,Yogyakarta yang ditulis oleh Resita Melinda, nomor mahasiswa 100510455, Fakultas Hukums Universitas Atma Jaya Yogyakarta:

a. Rumusan masalah:

Bagaimana PertanggungJawaban Pidana yang diberikan terhadap seorang wanita yang melakukan Tindak Pidana aborsi atau Pengguguran Janin dalam kasus di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta?

b. Tujuan penelitian :

Untuk mengetahui pertanggungJawaban Pidana seperti apa yang akan diberikan kepada seorang wanita yang melakukan tindak pidana aborsi khususnya dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta.

c. Hasil Penelitian :

Dalam kasus yang diteliti, seorang wanita yang melakukan tindak pidana aborsi telah melanggar pasal 346 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dalam masa percobaan 2 tahun. Putusan yang di berikan mejelis Hakim kepada wanita pelaku tindak pidana aborsi tersebut telah memenuhi 3 unsur yang ada di dalam pasala 346 KUHP yaitu yang pertama unsur barang siapa, kedua, dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya kandungan perempuan dengan seijin perempuan itu, serta mempertimbangkan hal – hal yang dapat meringankan terdakwa. Sebab pertanggung jawaban pidana bukan untuk membalas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku aborsi tersebut, namun bertujuan untuk memberikan efek jera agar ia tidak mengulangi perbuatan aborsi itu lagi.

F. Batasan Konsep

1. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Tindak pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

3. Aborsi

Pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai (18-40 minggu).

4. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada data sekunder, sebagai data utama dan data primer sebagai data penunjang.

2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

a. Bahan hukum primer, meliputi :

- 1) Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Khususnya Pasal 346, 347, 348, dan 349 mengatur tentang kejahatan tentang nyawa, Pasal 283 dan Pasal 299 mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan Pasal 535 tentang pelanggaran kesusilaan.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330.
- 4) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM..
- 5) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- 6) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

7) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

8) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

b. Bahan hukum sekunder, meliputi :

Fakta Hukum, Doktrin, Asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.

c. Bahan hukum tersier, meliputi :

Bahan yang digunakan dalam penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

d. Proses berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prodsedur bernala diguna secara dedukif

3. Metode pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahasa pustaka berupa pendapat atau tulisan para ahli.

b. Dilakukan wawancara yaitu dengan telah mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara.

4. Metode Analisis data terhadap:

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

- b. Bahan Hukum sekunder yang berupa pendapat hukum di analisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukum).
- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan.
- d. Cara Mengambil kesimpulan yaitu dengan melihat rumusan masalah dari pihak Polisi DIY.

H. Sistematika penulisan hukum

Penulisan hukum ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

2. BAB II PERAN POLISI DIY DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DAN KENDALANYA.

Pada bab ini diuraikan dan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan Aborsi dan cara penanggulangannya. Uraian tentang Bab ini meliputi tinjauan tentang tindak pidana aborsi yang terjadi pada anak dibawah umur. Selanjutnya pada bab akhir ini menyajikan tentang usaha polisi dan menanggulangi tindak pidana aborsi yang terjadi pada anak dibawah umur yang dilakukan oleh anak dibawah umur di DIY.

3. BAB III PENUTUP DAN SARAN

Merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan hasil penelitian yang penulis lakukan berisi saran.